

Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat dan Sumatera Utara Periode 2017-2021)

Rohmatul Faizah^{1*}, Yulinda Devi Pramita¹, Wahyu Anggit Prasetya¹

¹ Program Studi Akuntansi/ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Magelang, Indonesia

*email: rohmatulfaizah19@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to empirically examine and analyze the influence of financial performance assessed by solvency, revenue effectiveness, expenditure efficiency, and regional autonomy on the accountability of local government financial reporting in municipalities/districts in East Java, West Java, and North Sumatra provinces during the period 2017-2021. The population of this study consists of 97 local governments in East Java, West Java, and North Sumatra provinces. Using purposive sampling, 34 local governments meeting the criteria were selected. The research method employed quantitative approach and data were analyzed using logistic regression. The findings indicate that solvency does not affect the accountability of local government financial reporting, revenue effectiveness positively influences the accountability of local government financial reporting, expenditure efficiency does not affect the accountability of local government financial reporting, and regional autonomy positively influences the accountability of local government financial reporting.

ABSTRAK

Kata Kunci:
Kinerja
keuangan;
pemerintah
daerah;
akuntabilitas
pelaporan
keuangan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh kinerja keuangan yang dinilai dengan solvabilitas, efektivitas pendapatan, efisiensi belanja, dan kemandirian daerah terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah pada pemerintah daerah kota/kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat dan Sumatera Utara periode 2017-2021. Populasi dari penelitian ini adalah 97 pemerintah daerah pada Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat dan Sumatera Utara. Dengan menggunakan *purposive sampling*, terdapat 34 pemerintah daerah yang memenuhi kriteria. Metode pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan data dianalisis menggunakan regresi logistik. Hasil yang diperoleh adalah solvabilitas tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah, efektivitas pendapatan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah, efisiensi belanja tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah, dan kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

PENDAHULUAN

Adanya kewenangan otonomi daerah termasuk pengelolaan keuangan yang dilakukan secara mandiri oleh pemerintah daerah memungkinkan terjadinya penyalahgunaan wewenang yang kemudian dapat menimbulkan perilaku buruk untuk mementingkan keuntungan sendiri yaitu korupsi. Adanya tindakan korupsi ini menunjukkan bahwa perwujudan akuntabilitas melalui pelaporan keuangan pemerintah daerah masih berjalan buruk (Pramesti & Haryanto, 2019). Perkembangan korupsi di Indonesia khususnya sektor publik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Perkembangan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia

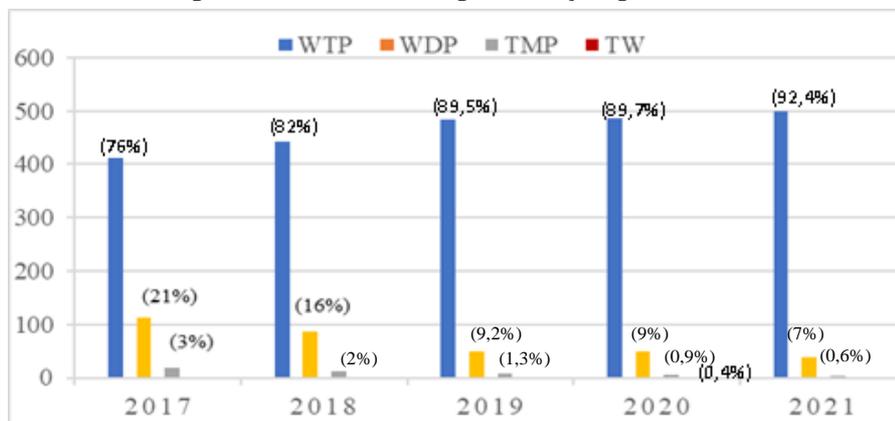
(Persepsi Korupsi Sektor Publik dalam 5 Tahun)					
Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
Indeks	37	38	40	37	38

Sumber: *Transparency International* (2022) diolah kembali

Melalui tabel 1 dapat diketahui perkembangan skor yang diperoleh Indonesia menunjukkan masih jauh dari skala 100, hal ini merupakan capaian yang tidak membanggakan dan menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki banyak kasus korupsi khususnya di sektor publik. Hal ini mengindikasikan bahwa akuntabilitas masih berjalan buruk. Oleh karenanya pemerintah dituntut untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan guna mewujudkan *good governance*.

Sweetenia et al (2019) menyatakan bahwa Pemerintah desa harus mampu melaksanakan akuntabilitas terhadap pengelolaan ADD melalui penyajian laporan keuangannya. Pemerintah dalam upaya mewujudkan akuntabilitas salah satunya yaitu dengan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tepat waktu dan relevan yang disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah diterima secara umum, yang kemudian informasi yang terdapat pada laporan keuangan memungkinkan masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui sejauh mana kinerja keuangan pemerintah daerah. Untuk meningkatkan kualitas transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah, maka laporan keuangan perlu di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dibentuk untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bertindak sebagai pihak independen yang mengaudit laporan keuangan untuk memberikan indikasi bahwa pemerintah daerah melaksanakan akuntabilitas pelaporan keuangan secara umum melalui penilaian kewajaran informasi. Oleh karena itu, BPK menerbitkan laporan auditor sebagai penilaian atas akuntabilitas pelaporan keuangan tahunan (Asfiryati et al., 2017). Sari (2020) mengatakan bahwa “semakin baik opini pemda semakin tinggi tingkat akuntabilitas pelaporan keuangan”.

Pada Semester I Tahun 2022, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) melakukan pemeriksaan terhadap 576 objek pemerintah daerah.



Gambar 1. Perkembangan opini WTP Pemerintah Daerah 2017-2021.
Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (2022) diolah kembali

Diantaranya meliputi 541 hasil pemeriksaan keuangan, hasil pemeriksaan atas LKPD selama lima tahun (2017-2021) mengalami perkembangan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh Pemda. Berdasarkan gambar 1 pada tahun 2017 opini WTP sebesar 76% menjadi 92,4% pada tahun 2021 dan juga masih terdapat Pemda yang masih memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) bahkan juga opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHP) selama lima tahun terakhir selain terdapat pemerintah daerah yang mengalami kenaikan hasil opini, terdapat juga pemerintah yang mengalami penurunan opini. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mempertahankan opini sebagai wujud akuntabilitas cukup sulit dilakukan.

Tabel 2. Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Wilayah

No	Daerah	Jumlah TPK					Jumlah
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Jawa Timur	29	37	2	9	10	78
2	Jawa Barat	0	32	18	7	8	65
3	Sumatera Utara	5	22	4	9	5	45
4	Sumatera Selatan	1	1	4	3	30	39
5	Riau	4	3	11	13	2	33
6	Lampung	0	9	17	2	1	29
7	Jawa Tengah	6	8	6	0	2	22
8	DKI Jakarta	5	5	2	0	8	20
9	Jambi	4	8	2	2	2	18
10	Kalimantan Timur	6	0	5	6	0	17
11	Kalimantan Selatan	3	6	0	0	5	14
12	Banten	6	4	0	0	3	13
13	Bengkulu	7	5	0	0	0	12
14	Sulawesi Tenggara	1	5	0	0	5	11

15	Kalimantan Barat	0	0	10	0	0	10
----	------------------	---	---	----	---	---	----

No	Daerah	Jumlah TPK					Jumlah
		2017	2018	2019	2020	2021	
16	Nanggoroe Aceh Darussalam	8	0	0	0	0	8
17	Papua	2	3	2	1	0	8
18	Maluku	0	3	0	0	4	7
19	Sulawesi Utara	2	0	3	1	0	6
20	Sulawesi Tengah	0	0	0	6	0	6
21	Bali	1	0	0	0	3	5
22	Kalimantan Tengah	0	4	1	0	0	5
23	DI Yogyakarta	0	0	0	3	0	3
24	Sulawesi Selatan	0	0	0	0	3	3
25	NTB	0	0	3	0	0	3
26	Sumatera Barat	0	0	2	0	0	2
27	Kepulauan Riau	0	0	0	0	2	2
28	Maluku Utara	0	2	0	0	0	2
29	NTT	0	2	0	0	0	2
30	Kepulauan Bangka Belitung	0	0	0	0	0	0
31	Kalimantan Utara	0	0	0	0	0	0
32	Gorontalo	0	0	0	0	0	0
33	Papua Barat	0	0	0	0	0	0

Sumber: Komisi Pemberantas Korupsi (2022)

Berdasarkan data pada tabel 2, Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat dan Sumatera Utara merupakan provinsi yang memiliki tingkat jumlah tindak pidana korupsi tiga teratas, secara berurutan sebanyak 78, 65 dan 45 tindak pidana. Hal ini mengindikasikan bahwa akuntabilitas di Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat dan Sumatera Utara masih berjalan buruk. Akan tetapi, berdasarkan hasil opini yang diberikan BPK, ketiga provinsi tersebut telah memperoleh opini WTP yang mengindikasikan akuntabilitas pelaporan keuangan telah berjalan baik. Hal ini berkebalikan dengan data tindak pidana korupsi berdasarkan wilayah yang diperoleh. Kemudian apabila dilihat pada pemerintah kota/kabupaten di dalam ketiga provinsi tersebut, masih banyak kota/kabupaten yang mendapatkan opini selain WTP. Adanya pemerintah kota/kabupaten yang mendapatkan opini selain WTP mengindikasikan bahwa meskipun pemerintah daerah provinsi sudah akuntabel tetapi masih terdapat pemerintah kota/kabupaten yang di dalamnya yang belum akuntabel.

Dalam organisasi pemerintah, akuntabilitas yaitu pemberian informasi dan *disclosure* atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan tersebut, sehingga pengukuran kinerja keuangan sangat penting untuk menilai akuntabilitas pelaporan keuangan suatu pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah. Alat yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan yaitu dengan analisis rasio atas laporan keuangan yang

digunakan sebagai media akuntabilitas. Rasio yang digunakan dalam penelitian ini yaitu rasio solvabilitas, efektivitas pendapatan, efisiensi belanja dan kemandirian daerah.

Hasil penelitian Lie et al., (2016) menunjukkan solvabilitas berpengaruh positif terhadap opini audit *going concern*, penelitian Maradina (2019) dan Anggraini et al., (2021) menunjukkan solvabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap opini audit *going concern*. Sedang hasil penelitian yang dilakukan oleh Wibowo (2019) menunjukkan bahwa rasio solvabilitas tidak berpengaruh terhadap pemberian opini BPK, dan penelitian oleh Fitri & Khotimah (2022) menunjukkan bahwa solvabilitas tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mudhofar & Tahar (2016) menunjukkan bahwa efektivitas tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan. Namun hasil berbeda ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Muraiya & Nadirsyah (2018) yang menunjukkan bahwa efektivitas berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan, dan penelitian oleh Fitri & Khotimah (2022) menunjukkan bahwa efektivitas pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Muraiya & Nadirsyah (2018) menunjukkan bahwa efisiensi penyerapan anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wibowo (2019) yang menunjukkan bahwa efisiensi belanja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pemberian opini BPK, dan penelitian oleh Fitri & Khotimah (2022) menunjukkan efisiensi belanja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Saud & Trisha (2020) menunjukkan bahwa kemandirian daerah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mudhofar & Tahar (2016), Erryana & Setyawan (2016) dan Sari (2020) menunjukkan bahwa kemandirian daerah memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan.

METODE

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, dan Sumatera Utara terdiri dari 97 pemerintah kota/kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, dan Sumatera Utara. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan metode *purposive sampling*, kriteria dalam pemilihan sampel penelitian ini yaitu pemerintah kota/kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, dan Sumatera Utara yang mengeluarkan laporan keuangan yang telah diaudit periode 2017-2021. Kedua pemerintah kota/kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, dan Sumatera Utara yang mendapatkan opini audit dari BPK atas laporan

keuangannya periode 2017-2021. Tabel 3 menunjukkan variabel dan pengukuran pada penelitian ini.

Tabel 3. Variabel dan pengukuran

No	Variabel	Pengukuran	Sumber
1	Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini audit: Variable <i>dummy</i> WTP = 1 Selain WTP = 0	(Muraiya & Nadirsyah, 2018)
2	Solvabilitas	RS=Total Kewajiban/Total Aset×100%	(Fitri & Khotimah, 2022)
3	Efektivitas Pendapatan	REP=Realisasi Pendapatan/AnggaranPen dapatan×100%	Rasio(Fitri & Khotimah, 2022)
4	Efisiensi Belanja	REB=Realisasi Belanja/Anggaran Belanja×100%	(Fitri & Khotimah, 2022)
5	Kemandirian Daerah	RKD=PAD/Pendapatan Transfer×100%	(Sartika, 2019)

Penelitian ini menggunakan analisis program *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS) *for windows* versi 25. Pengujian yang dilakukan meliputi analisis statistik deskriptif dan analisis regresi logistik. Menurut (Ghozali, 2018:325) analisis regresi logistik cocok digunakan untuk penelitian dengan variabel dependen bersifat kategorikal (nominal atau non metrik) dan variabel independen kombinasi antara metrik dan non metrik. Tahapan yang dilakukan pada uji regresi logistik yaitu menilai keseluruhan model (*Overall Model Fit*), menguji kelayakan model regresi dengan menggunakan *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit*, koefisien determinasi (*Nagelkerke R Square*), matriks klasifikasi dan uji hipotesis dengan menggunakan Uji *Wald*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Statistik Deskriptif

Berdasarkan tabel 4, nilai rata-rata akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,93 dimana nilai maksimum sebesar 1 yang menunjukkan sudah beopini WTP. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah yang menjadi sampel sebagian besar sudah mendapat opini WTP. Nilai rata-rata solvabilitas sebesar 0,01388, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang menjadi sampel relatif memiliki solvabilitas rendah dengan melihat lebih dekatnya nilai rata-rata dengan minimum. Nilai rata-rata efektivitas pendapatan sebesar 1.00065, hasil ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang menjadi sampel relatif memiliki efektivitas pendapatan rendah dengan melihat lebih dekatnya nilai rata-rata dengan nilai minimum. Nilai rata-rata efisiensi belanja sebesar 0,89385, hasil ini menunjukkan pemerintah daerah yang menjadi sampel memiliki efisiensi belanja relatif rendah dengan melihat lebih dekatnya nilai rata-

rata dengan nilai minimum. Nilai rata-rata sebesar 0,32999, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang menjadi sampel memiliki kemandirian daerah relatif kecil dengan melihat lebih dekatnya nilai rata-rata dengan nilai minimum.

Tabel 4. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SOLV	158	0,001	0,075	0,01388	0,014167
EP	158	0,853	1,440	1,00065	0,071060
EB	158	0,642	1,075	0,89385	0,055289
KD	158	0,069	1,829	0,32999	0,316261
APKPD	158	0	1	0,93	0,255
Valid N (listwise)	158	ss			

Analisis Regresi Logistik

Berdasarkan tabel 5, Nilai konstanta sebesar -51,349 mengindikasikan bahwa jika variabel independen yaitu solvabilitas, efektivitas pendapatan, efisiensi belanja, dan kemandirian daerah dianggap konstan, maka rata-rata akuntabilitas pelaporan keuangan pada pemerintah daerah adalah sebesar -51,349. Koefisien regresi solvabilitas sebesar 47,586 berarti bahwa setiap terjadi peningkatan solvabilitas sebesar 1% maka akuntabilitas pelaporan keuangan pada pemerintah daerah akan meningkat 47,586 dengan anggapan variabel lain tetap konstan. Koefisien regresi efektivitas pendapatan sebesar 46,494 berarti bahwa setiap terjadi peningkatan efektivitas pendapatan sebesar 1% maka akuntabilitas pelaporan keuangan pada pemerintah daerah akan meningkat 46,494 dengan anggapan variabel lain tetap konstan. Koefisien regresi efisiensi belanja sebesar -0,347 berarti bahwa setiap terjadi peningkatan efisiensi belanja sebesar 1% maka akuntabilitas pelaporan keuangan pada pemerintah daerah akan meningkat -0,347 dengan anggapan variabel lain tetap konstan. Koefisien regresi kemandirian daerah sebesar 65,489 berarti bahwa setiap terjadi peningkatan kemandirian daerah sebesar 1% maka akuntabilitas pelaporan keuangan pada pemerintah daerah akan meningkat 65,489 dengan anggapan variabel lain tetap konstan.

Tabel 5. Hasil Uji Regresi Logistik

		B	S.E.	Wald	Df	Sig.	Exp(B)
Step	SOLV	47,586	35,103	1,838	1	0,175	4,638E+20
1 ^a	EP	46,494	20,336	5,227	1	0,022	1,557E+20
	EB	-0,347	6,954	0,002	1	0,960	0,707
	KD	65,489	21,370	9,392	1	0,002	2,764E+28
	Constant	-51,349	19,515	6,924	1	0,009	0,000

Persamaan model yang dihasilkan melalui persamaan uji regresi logistik pada tabel 5 adalah:

$$L_n = \frac{APKPD}{1-APKPD} = -51,349 + 47,586Solv + 46,494EP + (-0,347EB) + 65,489KD + \varepsilon$$

a. Menilai Keseluruhan Model (*Overall Model Fit*)

Berdasarkan tabel 6 dan tabel 7, nilai -2 Log likelihood awal sebesar 79,839 dan nilai -2 Log likelihood akhir sebesar 32,482. Penurunan nilai -2 Log likelihood yang terjadi menunjukkan bahwa penambahan variabel independen ke dalam model memperbaiki model fit serta menunjukkan bahwa model regresi yang lebih baik atau dengan kata lain model yang dihipotesiskan fit dengan data.

Tabel 6. Hasil Uji Keseluruhan Model Block Number 0
Iteration History

Iteration	-2 Log likelihood	Coeficients Constant
Step 0	1	89,853
	2	80,435
	3	79,844
	4	79,839
	5	79,839

Tabel 7. Hasil Uji Keseluruhan Model Block Number 1
Iteration History

Iteration	-2 Log likelihood	Coeficien ts					
		Constant	SOLV	EP	EB	KD	
Step 1	1	84,147	-2,558	8,733	2,637	1,415	0,770
	2	65,543	-8,675	22,498	7,367	3,005	2,429
	3	54,532	-17,299	37,622	15,218	3,261	5,980
	4	46,372	-26,086	40,284	24,780	1,710	11,848
	5	39,425	-34,560	33,605	33,710	-0,019	22,697
	6	34,744	-40,872	36,243	39,431	-1,156	38,395
	7	32,795	-46,008	42,736	42,666	-0,904	54,674
	8	32,491	-50,218	46,732	45,632	-0,462	63,620
	9	32,482	-51,306	47,557	46,460	-0,351	65,427
	10	32,482	-51,349	47,586	46,494	-0,347	65,489
	11	32,482	-51,349	47,586	46,494	-0,347	65,489

b. Uji Kelayakan Model Regresi

Berdasarkan table 5 hasil pengujian Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test menunjukkan angka 0,999. Nilai signifikansi yang diperoleh ini lebih besar dari 0,05 sehingga menunjukkan bahwa model regresi layak digunakan untuk digunakan dalam analisis selanjutnya

Tabel 8. Hasil Uji Kelayakan Model Regresi
 Hosmer and Lemeshow Test

Step	Chi-Square	Df	Sig.
1	0,948	8	0,999

c. Uji Koefisien Determinasi (*Nagelkerke R Square*)

Hasil pengujian koefisien determinasi menunjukkan nilai *Nagelkerke R Square* sebesar 0,653 yang berarti 65,3% variabel dependen yaitu akuntabilitas pelaporan keuangan dipengaruhi oleh variabel independen yaitu solvabilitas, efektivitas pendapatan, efisiensi belanja dan kemandirian daerah. Sedangkan sisanya sebesar 34,75 dipengaruhi variabel-variabel di luar model penelitian.

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi
 Model Sumarry

Step	-2 Log likeh ood	Cox & Snell R Squa re	Nagel kerke R Square
1	32,482 ^a	0,259	0,653

d. Matriks Klasifikasi

Penelitian ini secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa ketepatan prediksi yaitu sebesar 93,7%. Prediksi ini dikatakan baik karena mendekati 100%. Kemudian sebanyak 147 sampel diprediksi memperoleh opini WTP atau dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pelaporannya sudah akuntabel, dan sebanyak 11 sampel mendapat opini selain WTP yang berarti bahwa akuntabilitas pelaporan keuangannya belum akuntabel.

Tabel 10. Hasil Uji Matriks Klasifikasi
 Clasification *Table*^a

Step	Observed		PredictedAPKPD		Persen tage Corect
	APKPD	Selain WTP	Selain WTP	WTP	
1			5	6	45,5
			4	143	97,3
	Overall Per centage				93,7

e. Pengujian Hipotesis (Uji Wald)

Berdasarkan tabel 11, diperoleh nilai signifikansi variabel solvabilitas sebesar 0,175 > 0,05 dan nilai koefisien beta sebesar 47,586, sehingga dapat disimpulkan

bahwa solvabilitas tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah, dan hipotesis 1 dalam penelitian ini ditolak. Nilai signifikansi variabel efektivitas pendapatan sebesar $0,022 < 0,05$ dan nilai koefisien beta sebesar 46,494, sehingga dapat disimpulkan bahwa efektivitas pendapatan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah, dan hipotesis 2 diterima. Nilai signifikansi efisiensi belanja sebesar $0,960 > 0,05$ dan nilai koefisien beta sebesar -0,347, sehingga dapat disimpulkan bahwa efisiensi belanja tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah dan hipotesis 3 ditolak. Nilai signifikansi variabel kemandirian daerah sebesar $0,002 < 0,05$ dan nilai koefisien beta sebesar 65,489, sehingga dapat disimpulkan bahwa kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah dan hipotesis 4 diterima.

Tabel 11. Hasil Pengujian Hipotesis
Variabel in the Equation

		B	S.E.	Wald	Df	Sig.	Keterangan
Step 1 ^a	SOLV	47,586	35,103	1,838	1	0,175	H1: Tidak Diterima
	EP	46,494	20,336	5,227	1	0,022	H2: Diterima
	EB	-0,347	6,954	0,002	1	0,960	H3: Tidak Diterima
	KD	65,489	21,370	9,392	1	0,002	H4: Diterima
	Constant	-51,349	19,515	6,942	1	0,009	

PEMBAHASAN

Pengaruh Solvabilitas Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa solvabilitas tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya solvabilitas pemerintah daerah tidak memengaruhi akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah, atau dengan kata lain tingkat solvabilitas tidak memengaruhi penilaian auditor dalam memberikan opini audit pada laporan keuangan pemerintah daerah atas kewajaran laporan keuangan. Sebagian besar pemerintah daerah yang menjadi sampel memiliki solvabilitas rendah di mana pemerintah daerah tidak memiliki utang jangka panjang jadi utang yang dimiliki relatif sedikit dibandingkan dengan aset yang dimiliki pemerintah daerah sehingga risiko atas ketidakmampuan pemerintah daerah dalam membiayai kewajiban dengan aset yang dimiliki juga kecil.

Teori agensi menjelaskan bahwa pemerintah sebagai agen yang telah diberi amanat oleh prinsipal cenderung menghindari risiko ketidakpercayaan prinsipal atas kinerjanya, sehingga dengan menyediakan informasi kinerja keuangan salah satunya

informasi terkait pengelolaan kewajiban jangka panjang maupun jangka pendeknya untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kinerja keuangan pemerintah yang kemudian diawasi oleh BPK dengan dilakukannya audit. Tingkat solvabilitas yang buruk akan menimbulkan keraguan bagi auditor dalam menilai kemampuan pemerintah dalam mengelola keuangan. Sehingga semakin baik solvabilitas, pemerintah akan menyajikan informasi keuangan secara relevan, andal, dan wajar dalam laporan keuangannya sebagai bentuk pertanggungjawabannya atas pelaporan keuangan, sehingga akan dinilai secara baik oleh auditor.

Hasil dari penelitian ini tidak sejalan dengan teori agensi, auditor dalam memberikan opini tidak hanya melihat dari solvabilitas saja tapi juga mempertimbangkan faktor lainnya dan dampak dari perekonomian pada masanya. Jadi ketika suatu organisasi memiliki solvabilitas yang buruk tetapi dapat memperbaiki dan mengelola operasional dan keuangan dengan baik dan dapat menyajikan laporan keuangan secara wajar maka tingkat solvabilitas tidak berpengaruh dalam pemberian opini audit (Fitri & Khotimah, 2022). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wibowo (2019) dan Fitri & Khotimah (2022) yang menunjukkan solvabilitas tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan.

Pengaruh Efektivitas Pendapatan terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini menunjukkan efektivitas pendapatan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi efektivitas pendapatan maka semakin tinggi akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Muraiya & Nadirsyah (2018) mengatakan bahwa efektivitas dana publik ditandai dengan pembangunan infrastruktur yang memadai dalam bidang transportasi, kesehatan dan lain-lain. Efektivitas pendapatan yang tinggi diartikan bahwa pemerintah mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik seperti peningkatan pembangunan infrastruktur yang memadai pada bidang transportasi, kesehatan, dan lain-lain, sehingga memungkinkan pemerintah daerah menyajikan laporan keuangan dengan informasi secara jujur, wajar dan sebaik mungkin, sehingga dapat memperoleh opini yang baik dari auditor.

Teori agensi menjelaskan bahwa agen akan berusaha memaksimalkan sumber-sumber pendapatan yang dapat memberikan keuntungan baik untuk agen (pemerintah) sendiri ataupun prinsipal (masyarakat). Selain hal tersebut agen menghindari risiko ketidakpercayaan dari masyarakat sehingga dengan memberikan informasi efektivitas pendapatan daerah, merupakan upaya menampilkan kinerja terbaik dan tanggungjawabnya dalam mengelola keuangan daerah yang kemudian diawasi oleh BPK dengan dilakukannya audit untuk menilai kebenaran informasi yang di sajikan. Pemerintah daerah akan menyajikan laporan keuangan akan wajar dan sebaik mungkin

sehingga memungkinkan pemerintah daerah memiliki akuntabilitas pelaporan yang tinggi dalam bentuk opini yang baik yang diberikan oleh auditor.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori. Semakin tinggi efektivitas pendapatan menunjukkan bahwa pemerintah dapat memaksimalkan sumber-sumber pendapatan daerah, yang kemudian pemerintah daerah memperoleh kepercayaan Masyarakat dalam mengelola kekayaan daerah dan menyejahterakan masyarakat dengan pendapatan daerah yang tinggi. Sehingga pemerintah daerah akan menunjukkan kinerja terbaik dan berusaha menyediakan informasi serta menyajikan laporan keuangan yang wajar dan bebas salah saji, kemudian auditor menilai baik akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam bentuk opini yang baik. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muraiya & Nadirsyah (2018) dan Fitri & Khotimah (2022) menunjukkan efektivitas pendapatan positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan.

Pengaruh Efisiensi Belanja terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efisiensi belanja tidak memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya efisiensi belanja tidak memengaruhi akuntabilitas pelaporan keuangan. Efisiensi belanja pemerintah daerah pada penelitian ini relatif rendah hal ini berarti ketepatan belanja pada pemerintah daerah masih kurang. Efisiensi Belanja mungkin tidak memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah, hal ini karena dapat dipandang bahwa, pemegang jabatan kurang dibatasi kewenangannya, pengeluaran yang sering didasarkan pada hak/komitmen eksplisit, misalnya gaji dan pensiun, hal ini menjadi kesempatan mereka dalam mengambil keputusan yang kurang bijak dan mengurangi efisiensi (Morozumi & Veiga, 2016). Misalnya yaitu ketika pemegang jabatan melakukan penganggaran gaji dan pensiun mereka kurang dapat diawasi di mana gaji ini merupakan hak mereka yang kemudian ketika tidak teliti, mereka masih melakukan penganggaran gaji juga tambahan penghasilan pada pegawai yang sudah pensiun. hal ini membuat anggaran belanja menjadi besar dan tidak efisien. “Efisiensi belanja tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah yaitu karena dianggap kewenangan pemerintah daerah kurang dapat diawasi (Muraiya & Nadirsyah, 2018)”. Kemudian menyebabkan penyajian belanja terjadi penyimpangan ataupun tidak sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan ataupun tidak adanya bukti pertanggungjawabannya yang mendukung. Kesiapan organisasi perangkat daerah, baik sistem informasi akuntansi dan pelaporan yang kurang memadai, maupun sumber daya manusia yang dapat menimbulkan ketidaksesuaian dengan ketentuan dalam penyusunan laporan, ataupun tidak berjalannya dengan optimal kebijakan atau peraturan yang telah ditentukan, yang dapat menyebabkan kerugian finansial dan mengurangi kepercayaan auditor dalam memberikan opini.

Teori agensi menunjukkan bahwa untuk menghindari ketidakpercayaan masyarakat, pemerintah sebagai agen memastikan ketepatan dalam membelanjakan dana untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Melalui penyajian informasi efisiensi belanja pada laporan keuangan dapat membantu dalam menilai keefisienan pemerintah dalam membelanjakan uangnya dan dapat mendeteksi terjadinya kecurangan melalui pengawasan oleh BPK dengan dilakukannya audit. Semakin tinggi efisiensi belanja daerah pemerintah, maka akan semakin baik dan tepat dalam menyajikan laporan keuangannya dan memungkinkan pemerintah daerah memiliki akuntabilitas pelaporan keuangan yang tinggi dalam bentuk opini auditor yang baik.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori, efisiensi belanja tidak memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Auditor dalam memberikan opini tidak hanya melihat dari tinggi rendahnya efisiensi belanja tetapi juga kewajaran dan kesesuaian dari suatu informasi yang disajikan. Kinerja pemerintah daerah harus diawasi dan dalam upayanya dengan dilakukannya pemeriksaan laporan keuangannya oleh auditor. Akuntabilitas publik yang efisien seharusnya didukung dengan pengawasan oleh lembaga pemerintahan formal yang kuat, yaitu lembaga legislatif (DPRD) dan lembaga audit tertinggi yaitu BPK RI (Friedman, 2016), sehingga sistem penganggaran dapat berjalan sesuai dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muraiya & Nadirsyah (2018) menunjukkan bahwa efisiensi penyerapan anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan.

Pengaruh Kemandirian Daerah terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemandirian daerah memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah dengan kemandirian daerah yang tinggi dapat maka semakin tinggi akuntabilitas pelaporan keuangan pada pemerintah daerah. Kemandirian daerah yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan secara mandiri sehingga pemerintah akan memberikan pertanggungjawabannya berupa penyajian laporan keuangan yang baik dan sesuai dengan aturan. Hal ini juga diperkuat oleh pendapat Mudhofar & Tahar (2016) yang mengatakan bahwa pemerintah daerah dengan kemandirian daerah yang tinggi dinilai dapat membiayai kegiatan pemerintah secara mandiri, sehingga dalam memberikan pertanggungjawabannya pelaporan keuangannya kepada masyarakat akan menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatannya dengan baik. Sehingga memungkinkan pemerintah daerah dengan kemandirian daerah yang tinggi memiliki akuntabilitas pelaporan yang tinggi dalam bentuk opini yang baik yang diberikan oleh auditor.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori agensi, pemerintah sebagai agen berusaha menjaga kepercayaan masyarakat, dengan kemandirian daerah menunjukkan bahwa pemerintah dalam membangun daerahnya dapat dilakukan dengan mandiri dan hal ini secara tidak langsung masyarakat akan memberikan rasa kepercayaan kepada pemerintah pada kinerja keuangan pemerintah daerah dalam menyejahterakan rakyat yang kemudian dilakukannya pengawasan oleh BPK dengan dilakukannya audit. Semakin tinggi kemandirian daerah maka pemerintah akan mampu secara mandiri melakukan pembangunan daerah di mana manfaatnya akan dirasakan oleh masyarakat sehingga akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Kemandirian daerah yang semakin tinggi dapat membuat masyarakat percaya terhadap kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan dengan melihat informasi yang jelas dan akurat sesuai dengan harapan publik sehingga pemerintah daerah dalam memberikan pertanggungjawabannya pelaporan keuangannya dalam bentuk laporan keuangan kepada publik semakin baik (Sari, 2020). Kemandirian daerah yang tinggi berarti pemerintah daerah menghasilkan pendapatan asli daerah yang tinggi, sehingga pemerintah daerah yang memiliki kemandirian yang tinggi cenderung menyajikan laporan keuangan yang bebas salah saji sehingga memungkinkan pemerintah daerah memberikan laporan keuangan yang lebih akuntabel (Erryana & Setyawan, 2016). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muidhofar & Tahar (2016), Erryana & Setyawan (2016) dan Sari (2020) menunjukkan bahwa kemandirian daerah memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan menguji secara empiris pengaruh kinerja keuangan yaitu solvabilitas, efektivitas pendapatan, efisiensi belanja dan kemandirian daerah terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil pengujian hipotesis penelitian menunjukkan bahwa solvabilitas dan efisiensi belanja tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan efektivitas pendapatan dan kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdapat hal yang dapat diimplikasi bagi pemerintah daerah yaitu memperhatikan potensi-potensi sumber pendapatan dan juga memaksimalkan pendapatan asli daerah, dengan pendapatan yang efektif dan pendapatan yang mandiri, maka pemerintah daerah akan semakin baik dan dengan kemandirian daerah maka pemerintah daerah tidak bergantung pada pemerintah pusat dalam menyejahterakan masyarakat seperti memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur yang memadai, dengan demikian pemerintah daerah menyajikan laporan keuangan dengan informasi sebaik mungkin jujur dan wajar sesuai peraturan dan ketentuan, sehingga BPK menilai kewajaran informasi

dan memberikan opininya yang memproksikan pemerintah telah melakukan akuntabilitas pelaporan keuangan. Pemerintah daerah juga perlu untuk meningkatkan kesiapan organisasi perangkat daerah dalam penyusunan laporan keuangan dan juga perlunya dukungan pengawasan oleh lembaga pemerintahan formal yang kuat, yaitu lembaga legislatif (DPRD) dan lembaga audit tertinggi pada penganggaran sehingga terciptanya penganggaran yang efisien dan berjalan sesuai dengan tujuan menyejahterakan masyarakat.

Penelitian ini memiliki keterbatasan penelitian diantaranya yaitu periode yang digunakan pada penelitian ini terbatas pada fenomena yang ditemukan peneliti sehingga pada penelitian ini dilakukan selama 5 tahun (2017-2021). Objek yang menjadi sampel yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada fenomena yang terjadi pada periode penelitian, sehingga peneliti menjadikan pemerintah daerah pada Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, dan Sumatera Utara, sehingga hasil yang diperoleh terbatas pada tiga provinsi. Penelitian selanjutnya diharapkan juga dapat memperpanjang periode penelitian dan memperluas objek penelitian sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Acchkpk.id. (2022). TPK Berdasarkan Wilayah, Website KPK. Available at: <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-wilayah> (Accessed: 15 November 2022).
- Anggraini, N., Pusparini, H. dan Hudaya, R. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Dan Solvabilitas Terhadap Opini Audit Going Concern. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 6(1), 24–55.
- Asfiryati, D., Savitri, E. dan Al Azhar, A. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada SKPD Kota Dumai). Riau University.
- BPK RI. (2022). Bpk Ri. https://www.bpk.go.id/Ihps, Ihps_I_2016_1475566035, 420.
- Erryana, V. dan Setyawan, H. (2016). Determinan akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah (Studi empiris pada pemerintah daerah se-Jawa Tengah). *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 5(1),1–14.
- Fitri, M. dan Khotimah, H. (2022). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Pusat Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan. *Keunis*, 10(1), 1–12.
- Friedman, J. (2016). Budget Accountability Systems: What the Open Budget Survey Shows about Countries in the Asia and Pacific Region.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS. Yogyakarta: Universitas Diponegoro, Edisi 9). Semarang: *Badan Penerbit Universitas Diponegoro*, 490.
- Lie, C., Wardani, R. dan Pikir, T. W. (2016). Pengaruh likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan rencana manajemen terhadap opini audit going concern (studi

- empiris perusahaan manufaktur di BEI). *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia (BAKI)*, 1(2), 84–105.
- Maradina, J. (2019). Pengaruh Kinerja Keuangan Perusahaan Terhadap Opini Going Concern. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang* P-ISSN, 2339, 867.
- Morozumi, A. dan Veiga, F. J. (2016) 'Public spending and growth: The role of government accountability', *European Economic Review*, 89, 148–171
- Mudhofar, K. dan Tahar, A. (2016). Pengaruh desentralisasi fiskal dan kinerja terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia: Efek moderasi dari kinerja. *Journal of Accounting and Investment*, 17(2), 176–185.
- Muraiya, M. dan Nadirsyah, N. (2018). Pengaruh desentralisasi fiskal, efisiensi dan efektivitas penyerapan anggaran terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah provinsi aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 3(2), 236–253.
- Pramesti, L. dan Haryanto, H. (2019). Akuntabilitas dan Tingkat Korupsi Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 6(2), 298–308.
- Sari, M. (2020). Pengaruh kemandirian daerah, kinerja pemerintah daerah, dan sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21(1), 186–193.
- Saud, I. M. dan Trisha, G. F. (2020). Desentralisasi Fiskal, Politik Dinasti, Sistem Pengendalian Internal, Kinerja, Akuntabilitas Pelaporan Keuangan: Bukti Empiris Di Indonesia. *Akuntabilitas*, 14(1), 103–132.
- Sweetenia, A. M., Caesari, E. P. A., Aprillia, A. F., & Purwantini, A. H. (2019). Pengaruh kompetensi, sistem pengendalian internal, dan kualitas penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pemerintah desa. *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*, 17(1), 44-56.
- Transparency International. (2022). 2021 Corruption Perceptions Index - Explore Germany. Transparency.org. Available at: <https://www.transparency.org/en/cpi/2021%0Ahttps://www.transparency.org/en/cpi/2021/index/deu>.
- Wibowo, S. (2019). Akuntabilitas Kinerja Keuangan Dan Pemberian Opini Atas Laporan Keuangan Audited (Studi Kasus Pada Kementerian di Indonesia). *JIAFE (Jurnal Ilmiah*